

ETIKA DAN MORALITAS PENDIDIKAN (DITINJAU DARI ASPEK PENINGKATAN MUTU MANAJEMEN PENDIDIKAN)

*Ethics and Morality Education
(Judging from Aspect Quality Improvement of Education Management)*

H. Suleman Thaha
Sulemanthaha55@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: Culture in society changed give a value that changes in menanamkan culture, especially to the younger generation of our students yatu inculcate the culture of a culture of honesty being dishonest during exams at school by students is a stark warning that the world of education should return to ethics and morality as a character. Honesty, discipline, visionary thinking, ability to work together, justice is the key things to keep the implementation of education that meets the ethics and morality from the aspect of improving the quality of education. Sharp termination of ethical values and morality will cause a lot of unrest in the world of education. Being grounded to build strength through the implementation of quality education and meet ethics as a value that brings the nation's progress in the future dating. Untuk organize good education, ethics and morality are indispensable penhingkatan management quality ethical and moral education.

Keywords: ethics, morals, education, quality improvement, education management

Budaya dalam masyarakat yang berubah-ubah memberi nilai yang berubah dalam menanamkan kebudayaan terutama kepada generasi muda kita para pelajar yatu menanamkan kebudayaan dari budaya jujur menjadi tidak jujur pada saat ujian di sekolah oleh peserta didik merupakan peringatan keras bahwa dunia pendidikan harus kembali pada etika dan moralitas sebagai karakter. Kejujuran, kedisiplinan, berpikir visioner, kemampuan kerja sama, menegakkan keadilan adalah hal-hal kunci dalam menjaga pelaksanaan pendidikan yang memenuhi etika dan moralitas dilihat dari aspek peningkatan mutu pendidikan. Pemutusan tajam dari nilai-nilai etika dan moralitas akan banyak menimbulkan keresahan dalam dunia pendidikan. Menjadi beralasan untuk membangun kekuatan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan memenuhi etika sebagai nilai yang membawa kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Untuk menata pendidikan yang baik, beretika dan bermoral sangat diperlukan penhingkatan mutu manajemen pendidikan yang beretika dan bermoral.

PENDAHULUAN

Pendidikan yang pada dasarnya mengupayakan pengembangan manusia seutuhnya serta tidak terhindar dari berbagai sumber rintangan dan kegagalan. Karenanya pendidikan perlu diselenggarakan secara luas dan mendalam mencakup segenap segi kehidupan manusia. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu *leading sector* dalam pembangunan nasional. Ini sebuah perkembangan yang banyak ditunggu, selama ini sektor pendidikan selalu berada di deretan belakang program pembangunan nasional. Padahal sudah banyak contoh dari Negara-negara yang lebih maju daripada kita, bahwa sektor pendidikan dipatok paling depan. Kenapa demikian, karena Negara yang maju memahami betul bahwa kemajuan mereka pasti didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang

baik. SDM yang baik dan berkualitas hampir semuanya adalah produk dari program pendidikan dan latihan yang dimenej dengan baik sesuai dengan etika dan moralitas bangsa itu".

Dalam mengejar ketertinggalan ini tidak ada kata terlambat. Kita harus mulai menata kembali pendidikan nasional kita, sesuai dengan fungsi utamanya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap mengantarkan Indonesia sesuai cita-cita para pendiri bangsa ini. Semua sadar bahwa pembangunan pendidikan nasional yang sudah lebih setengah abad kita lakukan, belum mampu memberikan hasil sebagaimana mestinya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya perjalanan pendidikan nasional. Pandangan ini sejalan dengan Soedijarto yang menyatakan bahwa sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan pada

saat ini dipandang, dinilai sebagai masih rendah mutunya. Penilaian ini pada umumnya didasarkan pada ukuran kemampuan para pelajar menjawab soal-soal ujian sekolah baik berupa ujian tengah semester maupun ujian akhir.¹

Hal ini lebih pada faktor komitmen manusianya untuk memberhasilkan pendidikan. Artinya keberhasilan yang kita capai selama ini akibat dari pelaksanaan program yang belum optimal, sehingga banyak yang tercecer. Sikap kurang konsisten terhadap perencanaan dan pengelolaan program, pemaksaan program-program jangka pendek yang masih kurang berorientasi ke depan, masih banyaknya korupsi dan inefisiensi, salah urus, ketidakjujuran, hilangnya etika dan budaya ketimuran yang saling menghargai, merupakan faktor-faktor yang menghambat pembangunan kita khususnya di sektor pendidikan.

Merosotnya perjalanan bangsa ini, ditandai dengan sifat-sifat luhur bangsa yang di awal menjadi fondasi perjuangan bangsa, mulai ditinggalkan oleh generasi penerus (yakni kita-kita ini sekarang). Kondisi objektif ini menjadi kajian yang menarik dilihat dari pendidikan. Kemerosotan mutu pendidikan ini ditengarai sebagai penyebabnya adalah manajemen pendidikan yang belum memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, etika dan peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka penulis tertarik membahas tentang etika dan moralitas pendidikan: dilihat dari aspek peningkatan mutu manajemen pendidikan.

PEMBAHASAN

Beraneka macam permasalahan Pendidikan di Indonesia saat ini, Yang selalu diperdebatkan antara lain di samping masalah manajemen yang pengurusannya belum tepat khususnya pada tingkat satuan pendidikan, masalah lain tampaknya pembelajaran yang diterima peserta didik terlalu teoritik. Manajemen pendidikan baik pada tingkat pemerintah daerah maupun satuan pendidikan, sepertimasih di awang-awang, belum membumi dan masih memisahkan siswa dari kehidupan sehari-hari. dan belum dimenej secara

konstruktif, artinya layanan belajar dan fasilitas yang disediakan belum mendorong siswa untuk benar-benar belajar dan memperoleh keterampilan yang diperlukannya untuk hidup ditengah-tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai tantangan. Pendidikan kita belum membekali siswa bagaimana menghadapi kehidupan nyata di masyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus di kerjakan atau diperbuat, kecuali belajar dengan cara membaca buku, bersenang-senang ala kehidupan kota dan setelah lulus ingin meneruskan sekolah atau mencari pekerjaan dengan berbekal selebar ijazah. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk membahas hilangnya kejujuran, berpikir visioner, disiplin, kerja sama, keadilan, kepedulian dan tanggung jawab.

Hilangnya Kejujuran

Kejujuran bagian dari etika dan moral karena orang yang jujur dan bermoral adalah orang yang tingkah lakunya memenuhi etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "*ethos*" yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles (384 - 322 SM). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika/ moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Menurut Bertens (2004) etika dan moral adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkahlakunya. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa etika/moral merupakan ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan tingkah laku manusia.

Jadi, etika/moral membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar di pandang dari sudut baik dan buruk (akhlak mulia) sebagai suatu hasil penilaian yang telah menjadi kesepakatan termasuk di dalamnya nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu universal, berlaku di mana saja. Ada seseorang (*anonim*) pernah menulis: '*Jadikanlah kebenaran sebagai tempat kembalimu, kejujuran sebagai tempat keberangkatanmu, sebab kebenaran adalah penolong paling kuat dan kejujuran adalah pendamping paling utama*'. Ary Ginanjar A. menulis yang dikutip dari sebuah cerita film, seorang guru kungfu

¹Soedjarto. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. (Jakarta: 1997). h. 5.

tengah berdialog dengan muridnya, "Suaramu senantiasa pecah ketika mengatakan bukan yang sebenarnya", ujar sang guru. Sang murid tidak dapat berkata apapun karena sadar atas kebohongannya. Bahwa sebenarnya, manusia adalah makhluk yang senantiasa jujur. Sifat dan tubuh manusia sesungguhnya tidak siap dan tidak menginginkan ketidakjujuran.

Hasil penelitian yang dikemukakan Oleh Bejo Sujatmo menunjukkan bahwa ketika seseorang berbohong terjadi perubahan fisiologis pada tubuhnya, seperti perubahan pola pernafasan, tekanan darah, detak jantung yang meningkat, perubahan elektrolit pada kulit menjadi berkeringat dingin, serta perubahan nada suara. Itulah lahirnya *lie detector*, alat tes kebohongan, sebuah *polygraph* didapatkan saat seseorang menjawab ya atau tidak. Kalau kita memahami bahwa sebenarnya tubuh kita bereaksi terhadap tindakan dan ucapan yang mengandung kebohongan, maka orang memilih untuk tidak berbohong.²

Dengan kebohongan sebenarnya kehidupan seseorang menjadi tidak tenang, karena secara alamiah tubuh ini tidak mau bohong. Kejujuran adalah hukum alam, fitrah Tuhan, sama seperti mengalir air dari atas gunung ke lautan. Ketika seseorang memaksakan kebohongan, sama dengan memaksa air, mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, perlu tenaga dan upaya yang besar untuk mendorongnya. Dan ketika tenaga pendorong sudah habis, maka air akan mengalir kembali ke tempat yang lebih rendah seperti pada biasanya. Banyak sekali contoh dan cerita tentang kejujuran dan ketidakjujuran serta dampak yang mengiringinya.

Fakta-fakta empiris menunjukkan khususnya pada media masa cetak seperti surat kabar dan media masa elektronik seperti radio dan televisi hampir setiap hari memberitakan tentang terjadinya korupsi dan penyimpangan di kalangan birokrasi yang mengurus Negara bersama para partner kerjanya yang mengakibatkan kerugian Negara sangat besar. Perilaku korupsi ini terjadi di semua daerah pada berbagai instansi mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kasus-kasus besar seperti Sogok-meniyogok terhadap penegakan hukum sudah

dianggap persoalan biasa dinegeri ini, Penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) tidak adalagi rasa malu untuk melakukannya, pembalakan hutan, Penyalagunaan wewenang, pengurusan hasil tambang dan perusakan lingkungan karena nafsu korupsi masih terus berlangsung hingga detik ini, dan lain-lain yang penulis tidak dapat merinci satu persatu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah semoga kutukan Allah tidak dilimpahkan kepada kita bangsa Indonesia lantaran perbuatan segelintir orang yang tidak bermoral dan bererika direpublik ini.

Hal ini pula yang menempatkan Indonesia berada dalam posisi 10 besar Negara terkorup di dunia menurut indeks persepsi korupsi (CPI/*corrupt perception index*). Contoh lainnya, bocornya anggaran pendidikan melalui sejumlah proyek pembangunan bidang pendidikan, penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak tepat sasaran, sehingga pernah menempatkan Kementerian Depdiknas sebagai salah satu Kementerian paling korup. Bocornya soal-soal ujian nasional beserta kuncinya, merupakan contoh konkrit tentang hilangnya kejujuran pada tingkat peserta didik. Perguruan tinggi yang menjadikan sejumlah orang menjadi sarjana tanpa proses perkuliahan yang benar, tetapi dokumen Ijazah yang dikeluarkannya legal. Agen-agen pembuatan skripsi, tesis dan disertasi yang makin marak dan malasnya para mahasiswa berpikir dan bekerja keras untuk menulis, kemudian penjiplakan karya tulis dengansengaja, merupakan contoh nyata di depan mata kita tentang ketidakjujuran tersebut.

Pada tingkat satuan pendidikan perilaku korupsi juga tidak terhindarkan. Melalui berbagai berita pada media masa tampak bahwa menguapnya dana BOM untuk SMA dan BOS untuk SMP dan SD sederajat adalah ketidakjujuran yang nyata yang dipertontonkan di lembaga pendidikan. Jika diidentifikasi perilaku korupsi pada dunia pendidikan mungkin masih banyak lagi contoh serupa kalau kita telusuri lebih detail lagi. Akibatnya program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui program BOM, BOS dan berbagai macam istilah anggaran lainnya ternyata belum

²Bertens, K. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004). h. 61

mencapai sasaran dan tidak meningkatkan mutu pendidikan secara memadai. Perilaku penyimpangan ini dilakukan oleh mereka yang berkesempatan melakukannya dengan berbagai macam alasan mulai dari tidak seimbangnya antara kebutuhan dengan penghasilan. Kemudian ada peluang yang cukup untuk melakukan korupsi, dan di sisi lain lemahnya supremasi hukum. Mereka yang melakukan korupsi mungkin saja memahami bahwa akibat dari perbuatan mereka akan merugikan Negara dan juga merugikan banyak orang serta kualitas kerja yang rendah. Tetapi karena kerasnya desakan kebutuhan hidup ingin menjadi lebih mewah lagi, disertai peluang yang cukup, maka korupsi tetap dilakukan sebagai bagian dari peningkatan harta dan kekayaan.

Tidak Berpikir Jauh ke Depan (Tidak Visioner)

Berita tentang pembalakan hutan yang terjadi di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan pulau-pulau lainnya diseluruh pelosok nusantara ini serta penggalian tambang yang meninggalkan kerusakan lingkungan yang amat parah seperti tambang timah di Pulau Bangka, penambangan Batubara di Kalimantan selatan dan Kalimantan timur beberapa waktu yang lalu telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan lain-lain, juga terjadi di Freeport di Papua, merupakan bentuk nyata sebuah keputusan pemerintah yang tidak visioner. Siapa yang diuntungkan dari semua itu? Negara? Demi kemakmuran rakyat? Bukan. Ternyata banyak sekali rakyat di sekitar hutan, di sekitar penambangan yang tetap hidup miskin. Mereka yang kaya hanya beberapa gelintir orang dengan cara korupsi.

Pejabat yang terkait dengan berbagai proyek itulah yang ikut menikmati lebih banyak bersama pemilik modal, yang selalu mengatasnamakan rakyat. Bukan kesejahteraan rakyat yang diperjuangkan, tetapi memperbesar pundi-pundinya agar membawa kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. Akibat dari perilaku mereka yang korup itu adalah derita rakyat seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan sejumlah penderitaan lainnya dan masyarakat yang tertimpa bencana tersebut tetap dalam kemiskinan. Sedangkan mereka yang korup tersebut tinggal di daerah yang bebas banjir dengan rumah tempat tinggal yang mewah

dan bergengsi difasilitasi pendingin dan pendukung untuk mempertinggi kenyamanan di rumahnya tersebut.

Sebenarnya para pengambil kebijakan tersebut sudah berpikir jauh ke depan untuk keperluan dirinya dan keluarganya, itulah sebabnya mereka mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk anak cucu mereka sendiri. Berpikir ke depan bukan untuk keperluan semua apalagi untuk kepentingan bangsa, meskipun jargon mereka untuk rakyat, demi rakyat dan sebagainya (hanya pencitraan). Ucapan yang lemah lembut, penuh kesopanan, dan setiap saat memberi sedekah pada orang miskin menunjukkan mereka adalah orang yang baik dan saleh. Tetapi lebih dari 80% penghasilannya berasal dari perolehan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena apa bila yang diterimanya hanya gaji dan sejumlah tunjangan yang halal, tentu pola hidupnya jauh lebih sederhana dari pada yang ditampilkannya.

Rendahny Disiplin

Disiplin ditegakkan untuk mendukung tanggung jawab memecahkan masalah mengenai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin adalah sebuah proses yang digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja, proses ini melibatkan pimpinan dalam mengidentifikasi dan mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja. Bila masalah kinerja tidak diperbaiki, maka pimpinan ikut menanggung akibatnya.³ Pada hakikatnya kinerja merupakan prestasi dari seseorang pimpinan dalam mengendalikan kinerja. Sebagai pimpinan harus memahami hakikat kinerja, dalam hal ini Rivai mengatakan kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dalam mencapai hasil yang diharapkan.⁴

Kinerja berkaitan dengan disiplin dalam pencapaian atas tugas yang diberikan, karenanya secara empiris berkaitan dengan disiplin dapat dicermati berita tentang masi banyaknya PNS yang menambah liburnya setelah liburan/cuti

³Robert Barca, *Performance Management : Memberdayakan Karyawan, Meningkatkan Kinerja Melalui Umpan Balik, Mengukur Kinerja*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). h. 164

⁴Rivai, Veithzal, dkk *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2005). h. 15

bersama seperti culi lebaran, banyaknya PNS yang pada hari-hari kerja yang terjepit libur, menjadi alasan untuk tidak masuk kerja. PNS yang sering terlambat ke kantor, tidak mau mengikuti upacara Negara, memperlambat urusan masyarakat agar terjadi negosiasi, dan sebagainya. Semua ini hampir terjadi di semua daerah dan instansi pemerintah dengan berbagai alasan, seperti rendahnya penghasilan, macet, tidak ada pekerjaan di kantor, atasan pilih kasih, dan berbagai alasan lain yang menjadikan rendahnya disiplin.

Dilain pihak banyaknya anak sekolah dan mahasiswa yang membolos sekolah atau kuliah, menyogok guru atau dosen agar nilainya naik walaupun tidak sesuai dengan jerih payahnya, adanya guru-guru memperoleh ijazah sarjana tanpa mengikuti proses kuliah dari perguruan tinggi tertentu merupakan contoh-contoh ketidakdisiplinan yang terjadi setiap hari di sekitar tempat kerja kita. Ternyata sulit sekali membenahi serta memperbaiki kondisi ini dan telah menjadi penyakit, akibat rendahnya kesadaran untuk berdisiplin mematuhi segala peraturan perundangan. Terjadinya mafia hukum dan mafia peradilan, semuanya terjadi akibat rendahnya kesadaran dan etika untuk mematuhi aturan dan rambu-rambu yang seharusnya menjadi acuan bersama dalam bekerja. Para pimpinan mempunyai hak dan kewajiban untuk membina dan memberi teguran pada anggotanya jika dipandang kurang atau tidak menegakkan disiplin, jika teguran tidak membawa hasil dapat ditingkatkan pada tahapan berikutnya, yaitu peringatan, penurunan pangkat dan lain-lain cara pembinaan yang dapat dilakukan oleh pimpinan dalam menegakan kedisiplinan.

Krisis Kerja Sama

Masih sering kali kita melihat sendiri ataupun melalui media massa, terjadinya benturan dan konflik horizontal diantara komponen masyarakat, sebagai tanda bahwa bangsa kita sedang mengalami sebuah krisis persatuan dan kesatuan, dan mulai luntumya rasa atau budaya kerja sama yang di masa lalu menjadi kebanggaan bangsa ini. Kerja sama untuk kebersamaan pernah menjadi karakter bangsa ini, dan sekarang sedang diuji oleh berbagai kepentingan yang melunturkan nilai-nilai kerja sama atau gotong-royong yang di dalamnya ada nilai-nilai keikhlasan. Peristiwa-

peristiwa luntumya kerja sama tampak pada kasus konflik pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sering terjadi belakangan ini, adalah fenomena terjadinya krisis kerja sama, krisis kepercayaan yang diikuti oleh perilaku destruktif yang merugikan masyarakat maupun merugikan para calon kepala daerah yang ikut bersaing dalam pilkada. Bahkan disejumlah daerah dalam rangka pilkada tidak adalagi yang berminat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah, bahkan ada yang mengundurkan diri, tidak lain disebabkan karena adanya indikasi krisis kerjasama dalam mengikuti aturan dan undang-undang yang ada.

Tawuran antar warga hanya dipicu masalah-masalah sepele, tawuran pelajar dan mahasiswa, demonstrasi yang destruktif yang kerap kali terjadi, perilaku bonek sebagai suporter sepakbola, dibekukannya PSSI oleh menpora, terjadinya pengaturan skor sebelum bermain bola dan lain-lain sebagainya, ini menunjukkan terjadinya krisis kebersamaan. Jika kearifan yang dimiliki manusia semakin sempit dan terbatas, barangkali kegelisahan sebagai anak bangsa semakin beralasan. Potret sosial yang kini menjadi skenario massal masih menjadi tekanan dalam konteks berpolitik. Akibatnya, pertarungan yang tidak pernah akan menyelesaikan masalah terus berjalan tanpa ada "rem" nya. Keadaan itu dapat kita lihat secara kasat mata, pertunjukan terjadinya perpecahan dikalangan partai politik yang ditingarai hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu untuk memuaskan nafsu kekuasaan oleh kelompok tertentu dan ingin menunjukkan kekuatan dalam menggalang massa. Padahal, tugas sebagai manusia yang berbudaya senantiasa mengulurkan cinta kasih, perdamaian dan menjaga harmoni kehidupan diantara sesama.

Tetapi, kenyataannya sikap dan perilaku dalam potret masa kini, nilai-nilai etika, norma-norma sosial, dan hukum moral seolah menjadi "haram" untuk dijadikan landasan berpikir yang sehat. Bahkan, upaya untuk berani membohongi diri sendiri, adalah ciri-ciri luntumya nilai-nilai budaya. Dimensi sosial semacam ini, Indonesia di mata dunia semakin menjadi bahan lelucon. Apalagi yang harus dijadikan komoditi dan karakter bangsa dari berbagai aspek kehidupan yang dapat diteladani. Semua ini

menggambarkan ada sikap yang sedang sakit yang menggerogoti bangsa kita dan kondisi sakit ini melunturkan nilai etika dan moralitas yang dianut selama ini. Penyakit ini sangat sulit disembuhkan, meskipun obatnya adalah penegakan etika secara benar oleh semua pihak.

Krisis Penegakan Hukum

Menurut tulisan Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya *Bangkit dengan 7 Budi Utama*, menulis bahwa menurut Partnership for Governance Reform pada 2002 menempatkan lembaga peradilan di Indonesia sebagai lembaga terkorup menurut persepsi masyarakat. Diperkuat oleh laporan Komisi Ombudsman Nasional (KON) tahun 2002, menurut pengaduan masyarakat, penyimpangan di lembaga peradilan menempati urutan tertinggi. Hasil penelitian The Asian Foundation & AC Nielsen di Indonesia, menyatakan bahwa 49% sistem hukum tidak melindungi, 38% tidak ada persamaan di muka hukum, 57% sistem hukum masih tetap korup. Data yang dilansir Komisi Yudisial menyebutkan bahwa 2.440 hakim atau sekitar 40% dari total 6.100 hakim, bermasalah yang membuat praktik hukum diselimuti *judicial corruption*. yang demikian ini seperti tidak lagi memberi harapan bagi Indonesia untuk mengurus Negara dengan etika dan moralitas yang tinggi.

Terbongkarnya kasus suap para hakim, gubernur, pengacara dan belakangan ini yang disampaikan kepada publik secara terbuka bahwa penegakan hukum belakangan ini, merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai keadilan sudah sangat menurun di mata masyarakat bahkan suda sangat jorok. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan juga terasa ada nuansa ketidakadilan, karena pola kebijakan di daerah masih bersifat sentralistik, meskipun Undang-undang yang mengatur adalah desentralisasi. Jika dalam pola kebijakan hanya sekedar untuk meraih citra sebagai manusia Indonesia, maka kualitas yang dipersyaratkan tidak dapat diwujudkan. Untuk hal tersebut, kebijakan yang berkeadilan menjadi bagian yang substansial sifatnya. Bukan memberi penekanan pada konsep keorganisasian, sebagai bendera baru dalam praktik kebebasan. Para pengambil kebijakan dan masyarakat luas perlu berlatih dan belajar untuk bercermin pada kebutuhan

manusia terhadap kebenaran, dan nilai-nilai keadilan.

Krisis Kepedulian

Masih adanya sebagian masyarakat yang hidup dalam kemiskinan bahkan terjadinya kelaparan di beberapa daerah, di tengah banyaknya orang-orang yang hidup sangat berlebihan, sebagai bukti rendahnya kepedulian dan kebersamaan. Di Negara yang amat subur, memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, kekayaan darat, udara dan laut yang luar biasa, namun rakyat miskin terjadi di mana-mana. Keadaan ini aneh tapi nyata. Hal ini menunjukkan sangat rendahnya kepedulian sosial, rendahnya keadilan, dan rendahnya kesadaran untuk hidup bersama dan bermasyarakat.

Padahal kalau saja kesadaran membayar pajak secara benar oleh mereka yang mampu membayar pajak, bersedekah dan membayar zakat sesuai ajaran agama dengan prosedur yang benar, maka pajak, sedekah dan zakat itu cukup untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. Hal yang diperlukan saat ini adalah kesadaran dari semua pihak untuk berperilaku secara benar dan bijak menurut aturan yang ada dan ajaran agama yang dipeluk oleh masyarakat, untuk kemudian menjalankan semua aturan dan ajaran tersebut dengan komitmen yang tinggi meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kalau kita cermati lebih dalam, semua kejadian di atas dilakukan oleh orang-orang yang pernah duduk di bangku sekolah, terdidik dan terpelajar, orang-orang yang seharusnya tahu mana yang baik, karena semua perilaku yang baik itu sudah diajarkan di sekolah. Nilai-nilai yang baik dan luhur sesuai dengan etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat, dan itudidasarkan dari perilaku luhur masyarakat sebagai bentuk warisan nenek moyang dari generasi ke generasi.

Bagaimana penataan pendidikan kita ke depan? Di samping kecerdasan intelektual yang dibangun melalui pendidikan di sekolah, harus tetap dimasukkan pendidikan nilai-nilai yang telah berlaku di tengah masyarakat. Kurikulum dengan fleksibel harus bisa mengadopsi nilai-nilai tersebut ke dalam setiap mata pelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak kering, karena dipadu dengan nilai-nilai luhur yang akan mengiringi penerapan ilmu tersebut dalam

kehidupan masyarakat. Secara singkat nilai-nilai yang sangat banyak yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita, dan nilai-nilai tersebut bervariasi berlaku secara universal, karena di negara manapun nilai-nilai sebenarnya ada.

Tanggung Jawab

Dalam etika dan moral nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menurut Suhartono menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa pencipta alam semesta⁵. Bertens mengatakan tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya, orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Adapun masalah tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral.⁶ Dalam pembahasan ini lebih pada tanggung jawab moral dilihat dari etika pelaksanaan pendidikan. Pada dasarnya sekolah akan mampu mendidik anak-anak yang belajar di dalamnya, kalau di dalamnya terdapat orang-orang yang mau memikul tanggung jawab secara penuh.

Ada kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, orang tua dan murid itu sendiri. Masing-masing harus mau memikul tanggung jawabnya dengan baik. Kepala sekolah yang baik, akan mengetahui dengan baik seluk beluk yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Beban kerja dapat dibagi bersama semua pihak yang ada di sekolah tersebut, seperti disebutkan di atas. Masing-masing bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau semua pihak mau bertanggung jawab terhadap tugas sampai berhasil dengan baik, maka akan tidak ada lagi kesulitan yang tidak terpecahkan karena sebagai tim, harus saling membantu, mengingatkan, serta saling memotivasi agar semua bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Semua jelas apa yang menjadi tugas kepala sekolah, guru, tata usaha, murid, orang tua, pengawas sekolah. Semuanya fokus pada tugas masing-masing dan bertanggung

jawab sampai tugas tersebut berhasil dan selesai dengan baik, sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Berpandangan Jauh ke Depan/ Visioner

Proses pendidikan di arahkan untuk mengantisipasi masa depan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding masa lalu dan masa sekarang ini. Oleh karena itu layanan pendidikan dalam bentuk kegiatan mengajar dan Belajar bukan sekedar untuk menghadapi ujian nasional, jika telah lulus ujian nasional maka tercapailah target. Mengajar dan Belajar adalah upaya jangka panjang untuk mempersiapkan manusia Indonesia, generasi muda yang akan menjadi penggerak dan pelaku pembangunan bangsa, penerus generasi sebuah bangsa. Pendidikan jangan hanya berorientasi jangka pendek, harus visioner bersifat antisipatif bukan reaktif. Karena berorientasi jangka panjang, maka pendidikan harus dijalankan berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan adalah membuat masyarakat menjadi lebih cerdas yang berbasis pada nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat.

Sudah pasti, seiring dengan kecerdasan masyarakatnya akan terjadi pergeseran tata nilai menuju ke arah yang lebih baik dan dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pendidikan yang harus disejajarkan dengan tata nilai kemasyarakatan, sehingga pendidikan memiliki tumpuan yang kokoh yakni tata nilai tersebut. Tata nilai yang sudah baik dan diyakini mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik, harus dipertahankan. Jangan kita 'latah' dengan mengadopsi secara membabi-butu tata nilai asing yang tidak sesuai dengan tata nilai yang telah mengakar di masyarakat. Inilah tugas para pemimpin, pendidik dan para tokoh masyarakat untuk membimbing generasi muda ke depan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, efektif dan efisien tentu saja masih segudang nilai-nilai universal yang dapat dan harus dimasyarakatkan dan dilakukan bersama melalui lembaga pendidikan sebagai pionir. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terjadinya proses belajar dan mengajar kembali menjadi pusat kebudayaan dan penyemaian nilai-nilai luhur bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa

⁵Suhartono, Suparlan *Dasar-dasar Filsafat: Credo ut Intelligam, Saya Percaya, Supaya Saya Mengerti (Anselmus)*. (Yogyakarta: Ur-Ruzz. 2004). h.164

⁶Bertens, K. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004). h. 125

menurut pandangan Soedijarto salah satu indikator utamanya adalah kemampuan hasil pendidikan dalam menyumbangkan kepada bangsa dan negara dalam masalah-masalah nasional dan internasional khususnya bidang pendidikan.⁷ Hasil pendidikan yang diharapkan adalah melalui proses yang jujur dan memenuhi standar kualitas.

PENUTUP

Hidup dan bekerja dengan menjunjung tinggi etika moral, dan nilai-nilai luhur bangsa, sebenarnya kita telah berada dan sesuai dengan fitrah alam yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Dalam bukunya *Manusia bagi Dirinya*, Eric From bercerita tentang "Ketidakharmonisan eksistensi, manusia menimbulkan kebutuhan yang jauh melebihi kebutuhan asli kebinatangannya. Kebutuhan-kebutuhan ini menimbulkan dorongan yang memaksa untuk memperbaiki sebuah kesatuan dan keseimbangan antara dirinya dan bagian alam". Dari waktu ke waktu, kita hanya bisa merenungi peradaban baru yang membawa bangsa ini semakin bodoh dan tak tahu diri. Nilai-nilai luhur bangsa yang telah lama tergusur oleh kepentingan jangka pendek kehidupan masyarakat, harus dapat digali kembali melalui pendidikan. Pendidikan merupakan benteng yang tangguh untuk menanamkan nilai-nilai pada peserta didiknya, sehingga pendidikan khususnya yang dilaksanakan melalui lembaga sekolah dan kampus-kampus harus tetap tegar dan berani tampil demi tegaknya nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa dan juga meningkatkan kualitas peradaban. Dengan demikian tampaknya bahwa bangsa Indonesia memiliki peradaban yang menjunjung tinggi etika dan moralitas kehidupan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan bermoral.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Majid dkk. *Pendidikan Karakter Prespektif Islam*, PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta. 2011
- Abuddin, Nata, *Akhlak Tasauif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2009

- A.Malik. Fajar *Holistika Pemikiran Pendidikan*, PT. Remaja Grafindo, Jakarta. 2005.
- Aqil Siraj Said. *Tasauif Sebagai Kritik Sosial*, Yayasan Khas, Jakarta. 2009.
- Abuddin Nata. *Akhlak Tasauif*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta. 2009.
- Al-gazali, *Imam Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat*, Mutiara persada, Semarang. 2003
- Barca, Robert *Performance Management: Memberdayakan Karyawan, Meningkatkan Kinerja Melalui Umpan Balik, Mengukur Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Soedijarto *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. Jakarta: 1997.
- Suhartono, Suparlan *Dasar-dasar Filsafat: Credo ut Intelligam, Saya Percaya, Supaya Saya Mengerti (Anselmus)*. Yogyakarta: Ur-Ruzz. 2004.
- H.Syaiful, Sagala, dkk, *Praktek Etika Pendidikan di seluruh wilayah Nusantara, NKRI*, Penerbit Alfabeta.
- A.Malik, Fajar. *Holistik Pemikiran Pendidikan*, PT.Raja Grafindo Jakarta, 2005.

⁷Soedijarto *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad ke-21*. (Jakarta: 1997).